

Politik Kebijakan Pemerataan Pendidikan antara Sekolah Negeri dan Madrasah di Kabupaten Bojonegoro

Ahmad Qosim Al Hasani¹, Sri Minarti²

^{1,2}Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro

Email: ahmadqhosim14@gmail.com

Article Info

Article history:

Received April 28, 2026

Revised May 23, 2026

Accepted May 30, 2026

Keywords:

Education Politics, Education Policy, Education Equality, State Schools, Madrasahs

ABSTRACT

Equitable education is a key focus of national development, ensuring that all citizens receive the right to fair and quality education. However, in practice, there are still gaps between public schools and Islamic schools, particularly in terms of infrastructure, teacher quality, access to technology, and distribution of education budgets. This study aims to analyze the policy of equalizing education between public schools and Islamic schools in Bojonegoro Regency and to identify the factors influencing its implementation. This study used a descriptive qualitative method with an education policy study approach. Data were obtained through documentation, observation, and literature review from journals, books, and education data from Bojonegoro Regency. The results indicate that the local government has implemented various policies for equalizing education, such as the BOS (School Operational Assistance) program, the BOSDA (School Operational Assistance), the zoning system, education digitalization, and the Ayo Sekolah (Let's Go to School) movement. These policies have had a positive impact on increasing public access to education. However, policy implementation has not been optimal due to persistent disparities in facilities, teacher distribution, and budget support between public schools and Islamic schools. Differences in management authority between the Education Office and the Ministry of Religious Affairs also impact the effectiveness of equalizing education. Therefore, a more inclusive policy synergy is needed to create equitable distribution of quality education in Bojonegoro Regency.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 28, 2026

Revised May 23, 2026

Accepted May 30, 2026

Keywords:

Politik Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, Pemerataan Pendidikan, Sekolah Negeri, Madrasah

ABSTRACT

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu fokus utama pembangunan nasional untuk menjamin seluruh masyarakat memperoleh hak pendidikan yang adil dan berkualitas. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kesenjangan antara sekolah negeri dan madrasah, khususnya pada aspek sarana prasarana, kualitas tenaga pendidik, akses teknologi, dan distribusi anggaran pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik kebijakan pemerataan pendidikan antara sekolah negeri dan madrasah di Kabupaten Bojonegoro serta mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi implementasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kebijakan pendidikan. Data diperoleh melalui studi dokumentasi, observasi, dan kajian literatur dari jurnal, buku, serta data pendidikan Kabupaten Bojonegoro. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kebijakan pemerataan pendidikan seperti program BOS, BOSDA, sistem zonasi, digitalisasi pendidikan, dan Gerakan Ayo Sekolah. Kebijakan tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan akses pendidikan masyarakat. Namun demikian,

implementasi kebijakan belum berjalan optimal karena masih terdapat ketimpangan fasilitas, distribusi guru, dan dukungan anggaran antara sekolah negeri dan madrasah. Perbedaan kewenangan pengelolaan antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama juga memengaruhi efektivitas pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi kebijakan yang lebih inklusif agar tercipta pemerataan mutu pendidikan yang berkeadilan di Kabupaten Bojonegoro.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Ahmad Qosim Al Hasani
Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri
Email: ahmadghosim14@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus dipenuhi secara adil dan merata tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, maupun geografis (Permana, 2026). Pemerataan pendidikan menjadi salah satu fokus utama pembangunan nasional karena pendidikan berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengurangi ketimpangan sosial. Namun, hingga saat ini ketimpangan akses dan mutu pendidikan masih menjadi persoalan yang terus terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk pada lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama. Perbedaan kualitas sarana prasarana, tenaga pendidik, distribusi anggaran, serta akses layanan pendidikan menyebabkan munculnya kesenjangan antara sekolah negeri dan madrasah. (Ayu Nur Chamidah, 2024)

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mewujudkan pemerataan pendidikan, salah satunya melalui sistem zonasi penerimaan peserta didik baru (PPDB), bantuan operasional sekolah, program Kartu Indonesia Pintar (KIP), serta peningkatan digitalisasi pendidikan. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan antarsekolah dan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan yang bermutu. Akan tetapi, implementasi kebijakan pemerataan pendidikan masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan fasilitas pendidikan, kualitas tenaga pendidik, dan kondisi sosial masyarakat.

Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui berbagai program kebijakan daerah. (Minarti, 2021) Salah satu program yang pernah dijalankan adalah Gerakan Ayo Sekolah yang bertujuan menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat. Program tersebut menunjukkan adanya perhatian pemerintah daerah terhadap pemerataan akses pendidikan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu. Meskipun demikian, kondisi pemerataan pendidikan di Bojonegoro masih menunjukkan adanya kesenjangan antara wilayah perkotaan dan pedesaan serta antara sekolah negeri dan madrasah, terutama dalam aspek fasilitas pendidikan, kualitas pembelajaran, dan akses teknologi pendidikan.

Madrasah sebagai lembaga pendidikan berciri khas keagamaan memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan nasional. Namun dalam praktiknya, madrasah sering menghadapi keterbatasan dibandingkan sekolah negeri, baik dari segi anggaran, infrastruktur, maupun sumber daya manusia. Kondisi tersebut menimbulkan persoalan etis dan politis dalam kebijakan pendidikan, terutama terkait prinsip keadilan dan kesetaraan layanan pendidikan. Politik kebijakan pendidikan pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan penyusunan regulasi, tetapi juga menyangkut bagaimana pemerintah mendistribusikan sumber daya pendidikan secara adil kepada seluruh lembaga pendidikan.

Selain itu, kebijakan pemerataan pendidikan sering kali menimbulkan berbagai respons di masyarakat. Sebagian masyarakat menilai kebijakan pemerataan seperti sistem zonasi merupakan langkah positif untuk menghapus stigma sekolah favorit dan meningkatkan kualitas pendidikan secara merata. Namun, di sisi lain masih terdapat kritik mengenai belum meratanya kualitas guru, fasilitas sekolah, dan akses pendidikan di berbagai wilayah. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerataan pendidikan membutuhkan dukungan sumber daya yang memadai agar tujuan keadilan pendidikan dapat tercapai secara optimal (Iskandar et al., 2021).

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis bagaimana politik kebijakan pemerataan pendidikan diterapkan antara sekolah negeri dan madrasah di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai implementasi kebijakan pendidikan daerah, bentuk kesenjangan yang masih terjadi, serta faktor-faktor yang memengaruhi pemerataan pendidikan. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah maupun lembaga pendidikan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan mutu pendidikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena politik kebijakan pemerataan pendidikan antara sekolah negeri dan madrasah di Kabupaten Bojonegoro secara mendalam. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi nyata mengenai implementasi kebijakan pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta berbagai faktor yang memengaruhi kesenjangan pendidikan antara sekolah negeri dan madrasah.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dengan objek penelitian meliputi sekolah negeri dan madrasah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada adanya perbedaan kondisi fasilitas, sumber daya pendidikan, dan kebijakan pengelolaan pendidikan antara sekolah negeri dan madrasah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung kepada pihak terkait, seperti pegawai Dinas Pendidikan, pegawai Kementerian Agama, kepala sekolah, guru, serta tenaga

kependidikan. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen resmi pemerintah, laporan pendidikan, jurnal ilmiah, buku, serta data statistik pendidikan yang relevan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi sarana prasarana dan proses pelaksanaan kebijakan pendidikan di sekolah negeri maupun madrasah. Wawancara dilakukan secara semi terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai implementasi kebijakan pemerataan pendidikan serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti data jumlah sekolah, jumlah peserta didik, program bantuan pendidikan, dan kebijakan pemerintah daerah terkait pendidikan.

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan model analisis interaktif yang terdiri atas tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti melakukan proses pemilahan, pemusatan perhatian, serta penyederhanaan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Setelah itu, data yang telah dipilih disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian agar informasi lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan yang dilakukan berdasarkan hasil interpretasi data selama proses penelitian berlangsung.

Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data dari berbagai informan yang berbeda guna memperoleh informasi yang konsisten. Sementara itu, triangulasi teknik dilakukan melalui perbandingan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh menjadi lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan (Sandu Siyoto, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilakukan di beberapa sekolah negeri dan madrasah di Kabupaten Bojonegoro, ditemukan bahwa implementasi politik kebijakan pemerataan pendidikan telah berjalan melalui berbagai program pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Program tersebut meliputi Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Indonesia Pintar (PIP), bantuan sarana prasarana pendidikan, serta program digitalisasi pembelajaran (Putri, 2025). Pemerintah Kabupaten Bojonegoro juga menjalankan program peningkatan akses pendidikan melalui Gerakan Ayo Sekolah yang bertujuan menekan angka putus sekolah dan meningkatkan partisipasi pendidikan masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah negeri memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas pendidikan dibandingkan madrasah. Sekolah negeri pada umumnya memiliki kondisi gedung yang lebih memadai, laboratorium, perpustakaan, akses internet, serta media pembelajaran digital yang lebih lengkap. Sementara itu, beberapa madrasah, khususnya yang berada di wilayah pedesaan, masih mengalami keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan. Kondisi tersebut memengaruhi kualitas proses pembelajaran dan pelayanan pendidikan kepada peserta didik.

Selain fasilitas pendidikan, perbedaan juga terlihat pada aspek sumber daya manusia. Sekolah negeri cenderung memiliki jumlah guru ASN yang lebih banyak dibandingkan madrasah. Sebagian madrasah masih bergantung pada guru honorer dengan tingkat kesejahteraan yang relatif rendah. Hal ini berdampak pada stabilitas tenaga pendidik dan kualitas pembelajaran di madrasah. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa guru madrasah, keterbatasan insentif dan pelatihan profesional menjadi salah satu kendala dalam meningkatkan mutu Pendidikan (Arif et al., 2024).

Dalam aspek kebijakan anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi bantuan pendidikan belum sepenuhnya merata. Sekolah negeri dinilai lebih mudah memperoleh bantuan pembangunan dan pengadaan fasilitas dibandingkan madrasah. Hal tersebut dipengaruhi oleh perbedaan sistem pengelolaan antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama. Madrasah yang berada di bawah kewenangan Kementerian Agama sering kali menghadapi keterbatasan anggaran sehingga pengembangan fasilitas pendidikan berjalan lebih lambat.

Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya upaya pemerintah daerah dan pihak madrasah dalam mengurangi kesenjangan pendidikan. Beberapa madrasah mulai melakukan inovasi pembelajaran berbasis teknologi serta menjalin kerja sama dengan masyarakat dan lembaga swasta untuk meningkatkan kualitas Pendidikan (Wadud & Hsb, 2025). Selain itu, adanya bantuan program digitalisasi pendidikan dari pemerintah turut membantu madrasah dalam menyediakan media pembelajaran yang lebih modern.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Bojonegoro masih memiliki persepsi berbeda terhadap sekolah negeri dan madrasah. Sekolah negeri sering dianggap lebih unggul dalam aspek akademik dan fasilitas, sedangkan madrasah lebih dikenal karena pendidikan karakter dan nilai keagamaan. Perbedaan persepsi tersebut turut memengaruhi pilihan masyarakat dalam menentukan lembaga pendidikan bagi anak-anak mereka.

Secara keseluruhan, politik kebijakan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat. Akan tetapi, implementasi kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait ketimpangan fasilitas pendidikan, distribusi tenaga pendidik, dan alokasi anggaran antara sekolah negeri dan madrasah (Syukur Penerangan Hasibuan & Hasibuan, 2024). Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif dan berkeadilan agar pemerataan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal.

Pembahasan

Pemerataan pendidikan merupakan salah satu agenda penting dalam kebijakan pendidikan daerah Kabupaten Bojonegoro. Pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama berupaya memberikan akses pendidikan yang setara bagi peserta didik yang berada di sekolah negeri maupun madrasah. Namun, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kesenjangan, terutama pada aspek sarana prasarana, distribusi guru, serta dukungan anggaran pendidikan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD/ sederajat meningkat dari 97,01% pada tahun 2018 menjadi 99,99% pada tahun 2022. Sementara APM SMP/ sederajat meningkat dari 81,15% menjadi 85,35%. Namun pada jenjang SMA/ sederajat, APM masih relatif rendah yaitu hanya mencapai 64,57% pada tahun 2022 (Bojonegoro, 2022). Dari aspek kebijakan, pemerintah daerah telah mengupayakan pemerataan melalui program bantuan operasional pendidikan, pembangunan sarana prasarana, serta penerapan sistem zonasi. Sistem zonasi diterapkan untuk mengurangi kesenjangan antara sekolah favorit dan non-favorit dengan memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik berdasarkan wilayah tempat tinggal. Pemerintah juga menekankan pentingnya pemerataan distribusi guru agar tidak terjadi penumpukan tenaga pendidik di sekolah tertentu. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerataan belum sepenuhnya dirasakan oleh madrasah. Sebagian besar madrasah, khususnya yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, masih menghadapi keterbatasan sarana laboratorium, perpustakaan, dan teknologi pembelajaran dibandingkan sekolah negeri yang memperoleh dukungan langsung dari APBD melalui Dinas Pendidikan. Kondisi ini mengakibatkan kualitas layanan pendidikan antar lembaga belum sepenuhnya setara.

Selain itu, kebijakan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang mulai direalisasikan kembali menjadi salah satu bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap sekolah dan madrasah. Program ini bertujuan memperkuat layanan pendidikan sekaligus membantu lembaga pendidikan yang selama ini mengalami keterbatasan pembiayaan operasional (Fauzia et al., 2026).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa politik kebijakan pemerataan pendidikan antara sekolah negeri dan madrasah di Kabupaten Bojonegoro telah menunjukkan adanya komitmen pemerintah dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat. Berbagai kebijakan seperti program Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), sistem zonasi, digitalisasi pendidikan, serta Gerakan Ayo Sekolah menjadi bentuk upaya pemerintah untuk menciptakan pemerataan layanan pendidikan. Namun, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Masih terdapat kesenjangan antara sekolah negeri dan madrasah, terutama pada aspek sarana prasarana, akses teknologi pendidikan, distribusi tenaga pendidik, serta dukungan anggaran pendidikan. Sekolah negeri cenderung memiliki fasilitas yang lebih lengkap dan jumlah guru ASN yang lebih memadai dibandingkan madrasah. Sementara itu, madrasah masih menghadapi keterbatasan sumber daya dan pembiayaan sehingga memengaruhi kualitas layanan pendidikan yang diberikan. Selain faktor fasilitas dan anggaran, penelitian ini juga menunjukkan bahwa terdapat pengaruh politik kebijakan dalam proses distribusi sumber daya pendidikan. Perbedaan kewenangan pengelolaan antara Dinas Pendidikan dan Kementerian Agama menyebabkan koordinasi kebijakan pemerataan pendidikan belum berjalan maksimal. Akibatnya, pemerataan mutu pendidikan antara sekolah negeri dan madrasah masih belum

sepenuhnya tercapai. Meskipun demikian, madrasah tetap memiliki peran penting dalam pembangunan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro, khususnya dalam pembentukan karakter dan pendidikan keagamaan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan sinergi yang lebih kuat antara pemerintah daerah, Dinas Pendidikan, dan Kementerian Agama dalam menyusun kebijakan pendidikan yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada pemerataan mutu pendidikan tanpa membedakan jenis lembaga pendidikan. Dengan demikian, politik kebijakan pemerataan pendidikan di Kabupaten Bojonegoro tidak hanya menuntut peningkatan akses pendidikan, tetapi juga pemerataan kualitas layanan pendidikan agar seluruh peserta didik, baik di sekolah negeri maupun madrasah, memperoleh hak pendidikan yang setara dan bermutu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arif, S., Hidayati, D., & Dahlan, U. A. (2024). *Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah*. 6(3), 1–10.
- Ayu Nur Chamidah, S. M. (2024). *Manajemen Sekolah Dan Madrasah*. 2(2), 306–312.
- Bojonegoro, B. P. S. K. (2022). *Badan Pusat Statistik Kabupaten Bojonegoro Partisipasi Pendidikan*. <https://Bojonegorokab.Bps.Go.Id/Id/Statistics-Table?Subject=521&Sortby=Date%2ctitle&Sortorder=Desc%2casc>
- Fauzia, S., Islam, U., Maulana, N., & Ibrahim, M. (2026). *Kebijakan Pendidikan Islam Dan Pendidikan Nasional Di Indonesia Ekonomi Politik Anggaran*. 2, 241–247.
- Iskandar, W., Islam, U., & Sunan, N. (2021). *Analisis Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Madrasah*. 4(1), 1–22.
- Minarti, S. (2021). Partisipasi Masyarakat Dan Mutu Pendidikan Di Kabupaten Bojonegoro. *At-Tuhfah*, 8(1), 136–145. <https://doi.org/10.36840/jurnalstudikeislaman.V8i1.183>
- Permana, D. F. (2026). *Dinamika Dan Kebijakan Pendidikan* (Eko Handoyono (Ed.)). Pt Sada Kurnia Pustaka.
- Putri, R. (2025). Ekonomi Politik Pendanaan Pendidikan Islam: Analisis Alokasi Dana Bos Madrasah 2015-2025. *An-Nur: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran*, 1(2), 284–298. <https://doi.org/10.65802/An-Nur.V1i2.55>
- Sandu Siyoto. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*.
- Syukur Penerangan Hasibuan, & Hasibuan, Z. E. (2024). Dinamika Politik Pengembangan Madrasah: Tantangan Dan Peluang Menghadapi Persaingan Global. *Ahsani Taqwim: Jurnal Pendidikan Dan Keguruan*, 1(3), 299–314. <https://doi.org/10.63424/Ahsanitaqwim.V1i3.92>
- Wadud, A. A., & Hsb, Z. E. (2025). *Peran Pemerintahan Dalam Politik Pendidikan : Implikasinya Terhadap Sekolah Dan Siswa Di Mts Al-Ikhlas Dalam Li*. 2.